

TEMBI 2004 DALAM PERSPEKTIF BUDAYA: WOLAK-WALIKING JAMAN, DIMANA KITA BERDIRI?*

Oleh Ashadi Siregar

Kehadiran kita, kepastian kita bertindak, kebingungan kita bersikap, hanya dapat dihayati dalam konteks realitas. Dimana kita berdiri, apakah mewujudkan realitas, atau sebaliknya, kita terperangkap dalam suatu realitas? Kita, adalah warga masyarakat yang ada di masa lalu maupun di masa kini. Peran kita dalam kehidupan sesungguhnya terletak pada posisi kita terhadap realitas.

Realitas, biasa dipilah antara realitas sosial dan realitas media. Realitas sosial bersifat obyektif (empiris) dan subyektif (pskhis) dalam interaksi warga. Sedangkan realitas media pada hakikatnya adalah refleksi dari realitas sosial.

Di satu sisi, realitas media merupakan refleksi realitas obyektif, diwujudkan dengan informasi faktual, mengikuti kaidah epistemologi. Kaidah ini menjadi landasan dalam dunia akademik dan jurnalisme yang tujuannya kebenaran, dalam norma kebebasan akademik dan kebebasan pers. Di sisi lain, realitas media merefleksikan realitas subyektif warga masyarakat, sebagai informasi fiksional yang diwujudkan melalui kaidah estetika, dalam norma kebebasan ekspresi.

Lingkup dan batasan kebebasan akademik dan pers satu kelompok, dan kebebasan ekspresi kelompok lainnya, hanya dapat terwujud pada landasan acuan nilai bersama (*shared values*) dalam suatu masyarakat. Krisis epistemologi dan estetika dalam suatu masyarakat dapat terjadi akibat ketidak-jelasan acuan nilai (*anomie*) di satu pihak, dan kelemahan metodologi pelaku profesional di pihak lain, yang selanjutnya akan melahirkan tindakan-tindakan anomali.

Krisis ini tercermin pada dimensi kebenaran dan keindahan. “Carut-marut” kegiatan akademik (di antaranya kekerasan dalam dunia pendidikan, plagiarisme penelitian/karya akademik) serta keberadaan media massa yang dianggap “kebablasan” (dengan limpahan informasi kekerasan dan pornografi serta sewenang-wenang meng”intruding” kehidupan *privacy*), atau pertunjukan hiburan yang tidak jelas lagi apakah untuk keindahan atau libido, pada dasarnya bersumber dari krisis dalam kaidah epistemologis dan estetika.

Lebih jauh marilah kita lihat realitas yang kita ciptakan atau pun menjadi ruang hidup kita. Realitas masyarakat dapat dilihat melalui kehidupan sosial/ empiris dan kehidupan kultural/simbolik. Selain itu, dalam perkembangan teknologi komunikasi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal sebagai realitas virtual atau *cyber*.

Maka kompleksitas masyarakat perlu dilihat pada realitas masyarakat bersifat empiris yang terbentuk atas interaksi sosial manusia, realitas masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan realitas masyarakat *cyber* (*cyber society*) yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan komputer multimedia. Demikianlah, konteks keberadaan manusia masa kini pada dasarnya dalam 3 dimensi realitas: empiris, simbolik dan virtual atau *cyber*.

Keberadaan manusia Indonesia pada hakikatnya menghadirkan diri sebagai warga dari masyarakat. Untuk itu sadar atau tidak, seseorang perlu mendefinisikan dirinya dan realitas yang melingkupinya. Bertolak dari pendefinisan ini permasalahan dikenali dan dapat

* Esai Pidato Kebudayaan disampaikan pada ACARA TEMBI 2004 DALAM PERSPEKTIF BUDAYA:: WOLAK-WALIKING JAMAN, Rumah Budaya Tembi, Bantul 23 Januari 2004

dilakukan respon. Sebagai warga masyarakat empiris pada dasarnya seseorang mendefinisikan diri sebagai konsumen pada pasar, serta sebagai pengguna atau klien dari kebijakan dan pelayanan publik pada negara. Sebagai warga masyarakat simbolik seseorang mendefinisikan diri sebagai orang Jawa, Dayak, Madura atau lainnya. Sekaligus juga menjadi bagian dari dunia simbolik yang diciptakan oleh pasar industri dengan budaya populer (*popular culture*). Begitu pula sebagai warga dari masyarakat *cyber*, manusia Indonesia dapat menjadi dirinya sebagaimana dalam masyarakat empiris dan simbolik, atau malah sebagai warga masyarakat virtual yang didefinisikan secara teknologis dan global.

Dimana pun tempatnya, parameter kedinian seseorang adalah kemampuan sebagai *user* atau *client* atau pun sebagai produsen, dan sejauh mana realitas masyarakat memberi kepuasan atau sebaliknya menimbulkan kekecewaan baginya. Pada sisi makro, masyarakat Indonesia dapat dikenali dari struktur sosial berupa disparitas penduduknya yang dilihat dari kesertaan dalam setiap realitas. Pada sisi mikro, ketidak-pasan atau ketidak-sesuaian (*mis-fit*) diri dalam suatu realitas, menjadi sumber krisis bagi problem pribadi, lebih jauh pada tataran agregat kolektif sebagai problem sosial yang melahirkan anomali sosial dalam berbagai bentuknya.

Di masa kini, setiap pengkaji atau kelembagaan yang bergerak dalam bidang sosial dan kultural pada dasarnya menghadapi realitas masyarakat dalam 3 macam dimensi realitas masyarakat yang menjadi ruang bagi seseorang. Untuk itu pengkaji dalam konteks Indonesia, menghadapi warga yang mendefinisikan dirinya sebagai “seseorang” yang menghadapi realitas keindonesiaan dalam ruang masyarakat empiris, simbolik dan virtual.

Masalah mendasar dalam konteks Indonesia adalah dari realitas masyarakat simboliknya yaitu kondisi multi-kultural dalam ruang sosialnya. Secara konseptual kondisi multi-kultural dikenal sebagai negara multi-bangsa (*multi-nation states*) atau negara banyak-suku (*poly-ethnic states*), dilihat dari varian warga masyarakatnya, dalam komposisi minoritas dan mayoritas. Orientasi multi-kultural merupakan masalah krusial di berbagai negara, sehingga pemerintah masing-masing serius menjalankan strategi multi-kultural. Strategi ini berfokus pada perlindungan atas hak kultural komunitas minoritas/marjinal, dengan menghindari dominasi komunitas dan hegemoni kultural dari mayoritas/kuat. Apakah ini juga menjadi fokus pemerintah dan masyarakat di Indonesia? Tidak disini jawabannya.

Kondisi multi-kultural ini menyebabkan suatu komunitas negara menjadi rentan (*vulnerable*) dengan adanya potensi konflik. Konflik muncul dan mendominasi ruang publik manakala berlangsung anomali, yaitu tindakan-tindakan ganjil yang tidak bertolak dari acuan nilai bersama dalam masyarakat multi-kultur. Ruang publik yang didominasi oleh sektarianisme agama mayoritas di Indonesia misalnya, merupakan anomali yang sulit dipahami. Sektarian lainnya bersifat sekuler, dengan ekslusifisme komunitas suku yang menyempal dari negara banyak-suku.

“Wolak-waliking jaman” dapat dimaknai sebagai penanda realita yang menjadi ruang hidup kita. Dalam arti, apakah kita terseret di dalamnya, ataukah mampu menemukan tempat berpijak. Persoalannya adalah dalam pendefinisan diri, serta pendefinisan 3 dimensi realitas yang menjadi ruang hidup kita, masa lalu dan masa kini, dan tentunya juga ke masa depan. Pendefinisan ini merupakan suatu kerja kultural, yaitu memahami diri dan realitas, serta menjalani kehidupan secara bermakna. Dalam konteks Indonesia makna untuk ketiga dimensi realitas ini perlu pula ditempatkan dalam landasan multi-kultural. Agaknya perjalanan ***Rumah Budaya Tembi*** dalam proses ini akan sangat diharap untuk dapat “membaca” masa lalu dan masa kini, menangkap makna dari realitas yang

melingkupi kita, untuk memelihara suatu komunitas terbayang: Indonesia yang multi-kultur.